

**SKRIPSI**

**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI KECAMATAN LUYO  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**PUTRI AYU NANDA**

**F0118502**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI KECAMATAN LUYO  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Proposal Skripsi Pada Program Studi  
Ilmu Politik (S1)*

**PUTRI AYU NANDA**

**F0118502**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

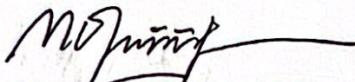
JUDUL :PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA(PKK) DALAM  
MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI KEC.LUYO KAB.POLEWALI MANDAR  
NAMA :PUTRI AYU NANDA  
NIM :F0118502  
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

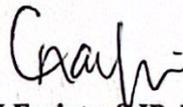
Majene 07 OKTOBER 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Muhammad Sultan, M.Si**  
NIP.19103282006041001

Pembimbing II

  
**Citra N Fariaty, S.IP., M.Si**  
NIP.199201262018032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sulawesi Barat



**Dr. H. Burhanuddin, M.Si**  
NIP.196209191989031004

**SKRIPSI**  
**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJATERAAN KELUARGA(PKK)**  
**DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN**  
**DI KEC.LUYO KAB.POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**PUTRI AYU NANDA**  
**F0118502**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada 07 Oktober 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

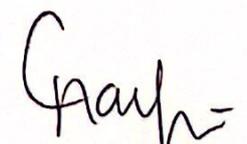
**Susunan Dewan Penguji:**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Asriani,S.IP., M.Si	Ketua Penguji	 .....
2. Ahmad Amiruddin,S.IP.,M.Si	Penguji utama	 .....
3. Dr. H. Burhanuddin,M.Si	Penguji/Anggota	.....

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Sultan, M.Si  
NIP.19103282006041001

Pembimbing II

  
Citra N Fariaty, S.IP., M.Si  
NIP.199201262018032001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Nanda

NIM : F01 18 502

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dari usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar sarjana yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 07 Oktober 2024



Putri Ayu Nanda

## **ABSTRAK**

*Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan meliputi seluruh kegiatan PKK yang tujuan meningkatkan kapasitas dan potensi perempuan, agar perempuan memiliki keterampilan dan keahlian untuk menghadapi permasalahan yang di hadapinya secara mandiri melalui peningkatan keterampilan. Saat ini PKK Kecamatan Luyo tidak memiliki banyak program terkait dengan pemberdayaan perempuan bahkan masih ada program yang belum terlaksana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah peran PKK Kecamatan Luyo belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaannya belum memenuhi seluruh indikator pemberdayaan perempuan yakni kesejahteraan, akses, pengetahuan, partisipasi dan kontrol. Terutama keterlibatan dari perempuan yang belum berumah tangga belum dapat di akomodasi dengan program yang tepat. Kendala utama dari terpenuhinya peran dari PKK Kecamatan Luyo adalah anggota Tim Penggerak PKK yang tidak aktif masih ada dalam struktur sehingga mereka kekurangan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran operasional untuk pelaksanaan program sangat kurang, tidak konsistennya pelaksanaan program yang bernilai ekonomis, program yang dilaksanakan tidak inovatif menyebabkan tidak meningkatnya keterampilan dari perempuan Kecamatan Luyo, serta akses dari informasi tentang program PKK Kecamatan Luyo masih terbatas menyebabkan partisipasi masyarakat kurang.*

***Kata Kunci: Tim Penggerak PKK, Pemberdayaan Perempuan, Program Kerja.***

## **ABSTRACT**

*The role of Family Welfare Empowerment (PKK) in women's empowerment encompasses all PKK activities aimed at enhancing women's capacity and potential. This empowerment enables women to develop skills and expertise to independently address their challenges through skill enhancement. Currently, the PKK in Luyo Subdistrict lacks numerous programs related to women's empowerment, with some programs yet to be implemented. This research aims to ascertain the role of Family Welfare Empowerment (PKK) in empowering women in Luyo Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The research employs a qualitative method, with informants selected through purposive sampling techniques. The conclusion derived from the study indicates that the role of PKK in Luyo Subdistrict has not been maximized, and its implementation does not fulfill all the indicators of women's empowerment, namely welfare, access, knowledge, participation, and control. Particularly, the involvement of unmarried women has not been adequately accommodated with appropriate programs. The primary obstacles hindering the fulfillment of PKK's role in Luyo Subdistrict include inactive members within the PKK structure, resulting in a shortage of human resources, insufficient operational budget availability for program implementation, inconsistency in executing economically valuable programs, lack of innovative programs leading to stagnant skill development among women in Luyo Subdistrict, and limited access to information about PKK programs, resulting in low community participation.*

**Keywords: PKK, Women's Empowerment, Work Program.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perempuan dalam pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, keterampilan, kemandirian, serta ketahanan mental, dan spiritual, perempuan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peran perempuan juga bertujuan, misalnya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemandirian dan kualitas kemajuan sumber daya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta memotivasi dan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk memajukan partisipasi dalam pembangunan, perlu dikembangkan kegiatan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk penentuan nasib. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi saat ini tidak lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan memiliki dua arti, yaitu pembangunan, kemandirian, swadaya dan penguatan posisi masyarakat kelas bawah terhadap kekuatan penindasan dari segala kelas masyarakat.<sup>2</sup>

PKK dibentuk untuk mengikutsertakan perempuan dalam program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan juga meningkatkan

---

<sup>1</sup> Aida Vitalaya S. Hubies, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa* (Bogor: IPB Press 2010), hlm.156

<sup>2</sup> Nyoman, Suartha, *Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 21

kesehatan ibu dan anak. Perempuan didorong untuk menghadiri secara teratur pusat-pusat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang dikenal sebagai pos pelayanan terpadu atau posyandu. PKK juga biasanya memberikan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kreatifitas, perempuan. Fokus kegiatan PKK adalah untuk mempromosikan pembentukan feminisme yang lebih terkait dengan gaya hidup yang lebih baik, dengan menjadikan ibu rumah tangga yang cerdas, kreatif dan inovatif. Menurut sejarahnya, PKK pada awalnya adalah singkatan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang mendorong perempuan demi berpartisipasi dalam program pendidikan perempuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berganti nama menjadi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan tujuan ikut memajukan dan membentuk keluarga di bidang mental, spiritual, dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Sejak tahun 1999 singkatan PKK diubah kembali menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kata pemberdayaan perempuan di pilih karena bermakna upaya yang sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan meliputi seluruh kegiatan PKK yang tujuan meningkatkan kapasitas dan potensi perempuan, agar perempuan memiliki keterampilan dan keahlian untuk menghadapi permasalahan yang di hadapinya

---

<sup>3</sup> Lilik Aslichati, Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan, hlm 2

secara mandiri melalui peningkatan keterampilan. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, mediator, perencana, pelaksana, pembimbing dan penggerak. Pembinaan PKK kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur Dinas atau Instansi Pemerintah terkait.

Kelompok penggerak PKK memiliki IV (empat) Kelompok Kerja atau Program kerja yaitu Pokja I yang tugasnya berkaitan dengan penghayatan Pancasila dan gotong royong; Pokja II, tugas pendidikan dan kompetensi; Pokja III, tanggung jawabnya berkaitan dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pokja IV, tanggung jawabnya berkaitan dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan yang baik.

Perempuan-perempuan di luyo dominan sebagai ibu rumah tangga yang hanya bergelut di dapur, tidak banyak yang organisai atau kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan, padahal jika banyak perempuan-perempuan yang ingin membentuk sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengangkat derajat (status) para kaum perempuan dalam masyarakat, keputusan dalam organisasi gerakan emansipasi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki yang bukan hanya mengurus pekerjaan rumah saja, akan tetapi juga sebagai guru anak-anak.

Keterkaitan perempuan dengan PKK merupakan persoalan bagaimana perempuan dapat berperan aktif dan berkembang untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan berpartisipasi dalam kegiatan PKK sehingga keberadaan perempuan diakui semua pihak. Hasil dari pemberdayaan ini

nantinya dapat dilihat pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan pertumbuhan keuangan seseorang. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam PKK, perlu dilakukan penguatan PKK melalui Reformasi PKK sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga di desa-desa yang ada di Kecamatan Luyo.

PKK Kecamatan Luyo setiap bulan melakukan rapat rutin untuk membahas program pembinaan serta lomba yang akan dilaksanakan. Meski begitu rapat tersebut terasa monoton karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merapatkan pembinaan tetapi tidak banyak pergerakan yang dilakukan. Pelaksanaan kebijakan sangat di pengaruhi oleh ketua PKK Kecamatan sehingga pergantian yang tidak pasti menyebabkan rentang waktu bagi Tim Penggerak PKK untuk kembali aktif memakan waktu. Selain itu keaktifan dari PKK Kecamatan sangat bergantung kepada Ketua sehingga jika ketua tidak aktif maka PKK tidak melakukan pergerakan, tetapi jika ketua aktif maka sangat banyak program yang terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua 3 PKK Kecamatan Luyo memperoleh fakta bahwa Tim Penggerak PKK di Kecamatan Luyo tidak mengalami perubahan walaupun ketua telah berubah. Masalah terbesar yang dihasilkan dari kebijakan tersebut adalah banyaknya anggota yang tidak aktif selama satu periode kepemimpinan tidak mengalami perubahan sehingga tentu saja hal yang sama akan terulang di periode selanjutnya. Tim Penggerak PKK Kecamatan Luyo saat ini beranggotakan 27 orang dengan anggota aktif hanya sekitar 10 orang. Kekurangan Sumber Daya

manusia menyebabkan terhambatnya beberapa program terkhusus di Pokja III yang programnya berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan rumah tangga, selain itu kemampuan dan pengetahuan anggota Pokja juga tidak memenuhi kebutuhan untuk program.

Saat ini PKK Kecamatan Luyo tidak memiliki banyak program terkait dengan pemberdayaan perempuan bahkan masih ada program yang belum terlaksana. Tim Penggerak baru melakukan pembahasan terkait program penanaman tetapi program tersebut tidak pernah berjalan lancar bahkan di Tim Penggerak sebelumnya. Penyebabnya adalah sedikitnya keterlibatan dari Tim Penggerak PKK Desa untuk mengaplikasikan program tersebut di Desa masing-masing. Terkait dengan pendidikan dan pemberdayaan rumah tangga juga tidak memiliki program yang terlaksana, semuanya baru sebatas pembahasan terutama masalah stunting dan kematian ibu dan anak yang sangat penting untuk dilakukan pembinaan dan perhatian.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas mengenai pentingnya peranan PKK dalam pemberdayaan perempuan, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mencoba melakukan penelitian bahwa PKK sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan desa mampu menggerakkan partisipasi masyarakat/perempuan desa dalam pembangunan. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk merencanakan Skripsi dengan judul. “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana peran dan pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di kecamatan Luyo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi tujuan antara lain adalah: Untuk mengetahui peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat sebagai sumbangsi untuk pengembangan pengetahuan mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian serupa dan bahan perbandingan bagi pemberdayaan

perempuan khusus melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

#### 1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pemerintahan di Kecamatan Luyo penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengarahkan sumber daya perempuan yang dimiliki di Kecamatan Luyo agar dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menunjang pembangunan masyarakatnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian yang berjudul “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan di kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar” yang akan diuraikan dalam 5 bab besar, sebagai berikut: Bab I akan berisi deskripsi mengenai latar belakang Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan di kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Bab II akan berfokus mengenai telaah teori serta telaah pustaka mengenai penelitian ini. Di bagian ini juga dijelaskan segala proses dalam peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan sumber referensi data awal penelitian terkait pemberdayaan perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memuat tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data,

teknik analisis data sampai pada waktu dan tempat penelitian. Pada bagian ini akan menjadi rujukan dalam mencari dan mengelola data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Bab IV akan berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti seperti, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), gambaran mengenai perempuan- perempuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Luyo sampai dengan program-program yang dilaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Luyo. Hasil penelitian Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan di kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menjawab pertanyaan yang telah dibuat yakni: Bagaimana peran dan pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di kecamatan Luyo?

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, dan saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini, peneliti tentu telah melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi yang terkait Penurunan Jumlah Perolehan Kursi Partai. menjadi bahan acuan yang nantinya mampu menjadi sebuah acuan atau pembanding berupa karya ilmiah, jurnal dan tentunya buku-buku yang pada dasarnya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk hasil penelitian ini nantinya.

Referensi yang pertama, Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ardliyana Trisnawati pada penelitian ini dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan melalui pelaksanaan program PKK bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu anggota PKK itu sendiri sehingga dapat menambah dan juga mengembangkan kemampuannya dalam mengelola keuangan keluarga dan bisa memberi kontribusi tambahan terhadap ekonomi keluarganya sehingga dapat tercipta keluarga yang sejahtera. Anggota PKK sebagian besar merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya mengurus keperluan rumah tangganya saja sehingga banyak mempunyai banyak waktu luang apabila pekerjaan rumah tangga sudah selesai dilakukan.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK Kelurahan Sukorame terdiri atas: mengasah potensi perempuan melalui pelatihan keterampilan, mengembangkan industri rumah tangga atau wirausaha dan mengembangkan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga. Strategi pemberdayaan perempuan yang dimiliki PKK Sukorame adalah untuk memberi penguatan kepada para perempuan agar memiliki rasa kontrol terhadap diri yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada disekitarnya, juga memiliki kesadaran kritis, ketika individu sudah mempunyai kesadaran kritis pada dirinya maka individu mampu memahami persoalan sosial mulai dari masalah yang ada di masyarakat

Referensi yang kedua, peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Penelitian yang dilakukan oleh Angelia E. Manembu dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Maumbi Kecamatan Kalawat mendukung pembangunan, yang dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni: Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kalawat tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa Maumbi

kecamatan Kalawat. Dalam hal transparansi, semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Dalam hal kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*) dalam pembangunan desa, berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi gender tertentu.

Referensi ketiga, Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Wati dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran PKK di kelurahan Endang Rejo ini adalah dengan membangun kerjasama antara PKK dengan pemerintah. sebagai mitra kerja pemerintah selama ini dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait atau antar lembaga yang berkaitan dengan program pendidikan dan keterampilan diantaranya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM), dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam program PNPM.

Referensi keempat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Kasus Di Dusun Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Oleh Saparwadi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

permasalahan sosial yang ada di masyarakat khususnya pada tingkat keluarga, seperti KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), banyaknya masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki kegiatan yang jelas (dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga), sehingga menjadikan masyarakat tidak produktif. Banyak program pemberdayaan dari pemerintah seperti PNPM akan tetapi tidak berjalan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengurus PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Demangan RW 05, menunjukkan bahwa pengurus PKK kampung Demangan berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ,jangkauan sumber produktif, dan partisipasi dalam proses pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat.

## **2.2 Telaah Teori**

### **2.2.1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Rakernas VII PKK Tahun 2010 adalah gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat nasional yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia

dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.<sup>4</sup>

b. Visi dan Misi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

a) Visi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan bahagia.

b) Misi

1. Memajukan pembentukan karakter kekeluargaan melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, gotong-royong serta kesetaraan dan keadilan gender.
2. Pengembangan pendidikan dan keuangan melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan pengembangan koperasi.
3. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan.
4. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia.

c. Adapun program PKK dibagi atas 4 Pokja :

Dalam pasal 7 dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, berikut adalah program yang semestinya dilakukan oleh setiap Pokja:

---

<sup>4</sup> Tim Penggerak PKK Pusat Pemberdayaan dan kesejahteraan PKK,(Jakarta: Tim Penggerak Pusat, 2015, hlm.9

## 1. Pokja 1

Pokja I melaksanakan Pembinaan Karakter dalam kehidupan keluarga penuh cinta dan kasih sayang dengan menanamkan sikap dan perilaku berbudaya dan berkepribadian Indonesia melalui keteladanan orang tua dan dituakan, melalui pengembangan anak sejak dini secara holistik integratif dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan semangat gotong royong. Kegiatan ini merupakan penjabaran 10 pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong.

### a. Tugas

- a) Mengoptimalkan peran orang tua yang mengasuh dalam menerapkan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang serta memberikan perlindungan terhadap anak.
- b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam keluarga akan pentingnya pembentukan sikap, perilaku, budi pekerti dan sopan santun dalam keluarga dan lingkungan melalui keteladanan dan pendidikan sejak dini secara holistik.
- c) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia (0-6) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara

optimal.

- d) Meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup program atau kegiatan Pokja

b. Prioritas Program

- a) penghayatan dan Pengalaman Pancasila Menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu.

- Mengoptimalkan peran orang tua yang mengasuh dalam merapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan budaya bangsa.
- Pembinaan karakter anak sejak dini yang meliputi pendidikan, budi pekerti, sikap dan perilaku melalui orang tua yang mengasuh dalam keluarga maupun lembaga-lembaga di masyarakat.
- Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai berbagai peraturan dan perundangan-undangan yang erat kaitannya dengan ketahanan keluarga, antara lain undang-undang perkawinan, perlindungan anak, hak asasi manusia, pencegahan perdagangan orang (trafficking), narkoba, pornografi, dan gerakan nasional anti kekerasan

seksual ppada anak (GNAKSA).

- Pembinaan Karakter Keluarga. Bina keluarga merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan orang tua atau keluarga dalam pengembangan balita, pendidikan Anak Usia Dini, remaja dan lansia.
- Pengembangan Kota Layak dan Ramah Anak. Berpartisipasi dalam program kota layak anak antara lain, sarana tempat bermain sarana tempat pendidikan, sarana tempat kesehatan, ramah dan peduli anak.

b) Gotong Royong Kegiatan gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerjasama yang baik antar sesama, keluarga, warga dan kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.

- Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, sikap tenggang rasa dan kebersamaan antara lain melalui kegiatan Jimpitan, Siskamling, Rukun kematian, Kelompok Keagamaan, dll.
- Memberdayakan lansia agar dapat menjaga ketahanan, mental dan spritual serta keterampilan, agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pasar/bazar

murah, bakti sosial di masyarakat.

- Berpartisipasi dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

## 2. Pokja II

Pokja II berperan serta dalam upaya peningkatan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam usaha memenuhi kebutuhan pendidikan dasar melalui wajib belajar 12 tahun, dan pemberian keterampilan keluarga dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil, serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 program Pokok PKK, yaitu Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan berkoperasi.

### a. Tugas

- a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif, ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil.
- b) Mendorong terbentuknya koperasi dan memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya pembinaan dan peningkatan ekonomi keluarga.
- c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk semua
- d) Memanfaatkan kelompok belajar (kejar) Paket A, B dan C.

## b. Prioritas Program

### a) Pendidikan dan Keterampilan

- Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang meliputi keterampilan di bidang ekonomi produktif, dan ekonomi kreatif.
- Meningkatkan keterampilan kecakapan hidup (life skill) dan pendidikan keluarga formal dan informal bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.
- Meningkatkan dan menuluh keluarga tentang wajib belajar 12 tahun (WAJAR 12 Tahun).
- Meningkatkan kapasitas Tutor kejar paket A, B, dan C melalui pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait.
- Meningkatkan mutu dan jumlah pelatih PKK dengan mengadakan pelatihan-pelatihan training of Trainer (TOT).
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan baca tulis, dan membudayakan, minat baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TMB).

### b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

- Penguatan/pengembangan kelompok-kelompok UP2K-PKK Meningkatkan sumber daya manusia/ pengelola program UP2K-PKK dalam upaya pengembangan program UP2K-PKK.
- Pengembangan pemasaran hasil produksi UP2K-PKK

melalui pameran dan kemitraan dengan kementerian dan lembaga serta instansi terkait.

- Mengembangkan kreatifitas Usaha Mikro kecil dalam upaya peningkatan produktifitas dan ekonomi keluarga.
- Memotivasi kelaurga agar tahu, mau dan mampu menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

### 3. Pokja III

Program POKJA III mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga dan diversifikasi pangan lokal, pemanfaatan sumber daya alam, melalui teknologi tepat guna dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Cinta dan bangga menggunakan dan memanfaatkan produk dalam negeri, serta mewujudkan rumah sehat dan layak huni. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 Program PKK, yaitu pangan, sandang dan perumahan dan tata laksana rumah tangga.

#### a. Tugas

- a) Memantapkan gerakan halaman,asri, teratur, indah, dan nyaman (HATINYA PKK) dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan keluarga dan melalui penganekaragaman tanaman dan pangan.
- c) Menumbuhkan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), berbasis sumber daya lokal.

d) Pengembangan dan sosialisasi rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga.

e) Meningkatkan produktifitas dan penggunaan bahan sandang dalam negeri dalam upaya menumbuhkan rasa bangga dan cinta produk dalam negeri.

b. Prioritas Program

a) Pangan

- Sosialisasi Gerakan Halaman Asri Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dengan tanaman pangan dan tanaman produktif yang bernilai ekonomi bagi keluarga.
- Mendukung tercapainya gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan.
- Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), mengkonsumsi sumber protein (Gemar Ikan) berbasis sumber daya lokal masyarakat dan potensi daerah.
- Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) berkoordinasi

dengan dinas/instansi terkait

b) Sandang

- Membudidayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencintai produk dalam negeri (aku cinta produk Indonesia).
- Pengembangan Pola pendamping kepada Usaha Kecil Mikro (UKM) dalam mengakses sumber pendanaan dan pemasaran bekerjasama dengan institusi terkait dengan dunia usaha.
- Memasyarakatkan pakaian adat kalangan remaja pada acara tertentu.

c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

- Memasyarakatkan pemanfaatan sumber energi dan teknologi Tepat Guna (TTG) dalam mendukung kebutuhan dan sarana dan prasarana dalam RumahTangga.
- Sosialisasi rumah sehat layak huni kepada masyarakat melalui pembinaan keluarga sehat.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga (termasuk Penghuni rusun).
- Mendukung pelaksanaan program bedah rumah dalam upaya rumah sehat layak huni bagi keluarga pra sejahtera.

#### 4. Pokja IV

POKJA IV mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan hidup bersih sehat, mencegah dan menanggulangi penyakit menular dan tidak menular berperan serta dalam upaya penurunan angka kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka Kematian Balita (AKBa), berpartisipasi dalam pencapaian Sustainable Developments Goals (SDGs), melestarikan lingkungan hidupp, keluarga berencana, dan perencanaan sehat. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari 10 program Pokok PKK yaitu Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

##### a. Tugas:

- a) Melaksanakan program keluarga sadar sehat dan kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat dalam keluarga dengan mencegah dan menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.
- b) Membina pelaksanaan kegiatan Posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kader Posyandu.
- c) Mendukung Promotif dan preventif kesehatan berbasis keluarga antara lain melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Polindes.
- d) Meningkatkan kesadaran keluarga tentang manfaat kelestarian lingkungan hidup.

e) Berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan Program Sustainable Development (SDGs).

b. Prioritas Program:

a) Kesehatan

- Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (BPHS) dalam rumah tangga sebagai gaya hidup sehari-hari untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dalam mewujudkan generasi yang sehat.
- Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBAL)
- Mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan (Kanker payudara dan kanker leher rahim).
- Advokasi, komunikasi dan mobilisasi sasaran dalam pelaksanaan imunisasi dasar lengkap serta sosialisasi asuhan mandiri dalam keluarga melalui pemanfaatan pengelolaan hasil taman obat keluarga dan akupresur.
- Mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga sadar gizi (KADARZI).
- Optimalisasi kegiatan Posyandu yang terintegrasi dengan layanan dasar masyarakat dalam upaya pencapaian program desa siaga serta peningkatan kualitas kader Posyandu melalui sosialisasi modul pelatihan kader posyandu bekerjasama

dengan institusi terkait.

b) Kelestarian Lingkungan Hidup

(a) Lingkungan Bersih dan Sehat

- Meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dalam rumah dan pengelolaan sumber pembuangan air limbah (SPAL).
- Sosialisasi dan menanamkan kebiasaan memilah sampah dan daur ulang limbah rumah tangga (sampah organik dan non organik) serta bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan air bersih, jamban sehat, dan memelihara kesehatan lingkungan melalui Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM).

(b) Kelestarian Lingkungan Hidup

- Sosialisasikan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat, dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat.
- Pembinaan kelestarian lingkungan hidup melalui pembinaan keluarga dalam rangka optimalisasi upaya mencegah dampak pemanasan global (Global warming).
- Mendukung program penanaman pohon sebagai Paru-paru kota dan pencegahan polusi udara.

(c) Perencanaan Sehat

- Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman

dan kesertaan dalam program keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas.

- Meningkatkan kemampuan perencanaan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara membiasakan menabung, untuk keseimbangan pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga.
- Mendukung kegiatan kesatuan gerak PKK KB-KES dalam upaya meningkatkan cakupan hasil pelayanan KB-KES.<sup>5</sup>

#### 2.2.2 Pemberdayaan Perempuan

##### a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Novian, Pemberdayaan perempuan merupakan usaha perempuan untuk memperoleh akses dalam kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Sementara itu dalam mengaplikasikan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan menggunakan 5 Indikator menurut Mayoux yaitu :

##### 1. Kesejahteraan (*Welfare*)

Kesejahteraan perempuan relatif terhadap dapat diukur, dengan fakta bahwa perempuan kesempatan yang sama dengan

---

<sup>5</sup> Ibid. hal 31-33

laki-laki untuk mengakses sumber daya seperti makanan mata pencaharian dan perawatan kesehatan.

2. Akses (*Acces*)

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam faktor produksi, misalnya dalam bidang pelatihan, fasilitas pemasaran dan pelayanan publik. Semua ini didukung oleh tersedianya peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik non diskriminatif.

3. Pengetahuan (*Connscientisation*)

Bagi Longwe yang menjelaskan tentang pengetahuan akan pemahaman gender, bahwa peran gender adalah hasil dari budaya dan dapat diubah.

4. Partisipasi (*Partisipation*)

Longwe mengartikan partisipasi disini adalah dalam proses membuat keputusan baik dalam membuat kebijakan, perencanaan (planning). Hal ini sangat penting dalam proyek pembangunan.

5. Kontrol

Perempuan dapat mengawasi proses kebijakan melalui pengetahuan dan gerakan untuk mencapai persamaan dalam mengontrol semua faktor produksi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> BPHN Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kompendium Tentang Hak-hak perempuan, hlm, 27-28

Sementara tujuan pemberdayaan perempuan menurut Novian adalah:

1. Memperkuat kedudukan dan peran perempuan dalam berbagai lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, berbagai dan bernegara.
  2. Meningkatkan kualitas peran perempuan sebagai pengambil keputusan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
  3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
  4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
  5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.<sup>7</sup>
- b. Upaya-Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan antara lain: Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Pemberian keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui

---

<sup>7</sup> Gagan Ganjar & Mukran Roni, , Pemberdayaan perempuan melalui daya saing produk berbahan ramah lingkungan dan UKM, , hlm 33

pelatihan-pelatihan. Metode pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan menjalankan program kerja dari PKK, yang kemudian diwujudkan kedalam berbagai program yaitu kegiatan seperti posyandu, pemberian modal usaha, serta berbagai kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan mampu untuk dijadikan peluang usaha bagi perempuan.

Selain itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan, mengajak ibu-ibu PKK ke dalam kegiatan PKK lainnya, seperti pada Penyuluhan dibidang Kesehatan dan keterampilan, yang artinya program kesehatan yaitu mengajak ibu-ibu ikut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu anak maupun lansia, dibidang keterampilan memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang kreatifitas seperti memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami Tanaman rempah-rempah (Dapur Hidup) yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat sendiri.

### 2.2.3 Teori Peran

Teori peran (*role theory*) menurut Janu Murdiyatomoko dalam Soerjono Soekanto merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang

aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>8</sup>

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>9</sup>. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur seseorang atau kelompok.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Atas dasar tersebut Soekanto menyimpulkan bahwa suatu peran mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2005) hlm. 238

<sup>9</sup> Ibid, hal. 243

- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (Teori Peran) yang dikemukakan oleh Sayogo yang dikutip dalam buku *Kontribusi Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Teori peran menekankan pada hakikatnya individu sebagai aktor sosial yang belajar perilaku sesuai dengan posisi dalam masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara orang, dalam suatu organisasi, dengan fokus pada peran mereka.<sup>10</sup>

Setiap peran adalah seperangkat hak, tanggung jawab, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang berperilaku dengan cara yang dapat di prediksi, bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan factor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam situasi sosial.

---

<sup>10</sup> Nyoman, Op.Cit. hal, 11-12

Narwoko peran lebih dipandang sebagai proses tindakan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. Ketika membahas tentang peran yang melekat pada individu dan kelompok dalam masyarakat, ada beberapa aspek yang terkait dengan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa peran-peran khusus harus dilaksanakan saat struktur masyarakat ingin mempertahankan kelangsungannya. Peranan tersebut melekat pada individu yang dianggap mampu oleh masyarakat menerapkannya. Untuk melakukan ini, Mereka harus dilatih dan dimotivasi.
2. Terkadang ada individu dalam masyarakat yang tak mampu memenuhi peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena pelaksanaannya mungkin membutuhkan terlalu banyak pengorbanan kepentingan pribadi.
3. Ketika semua orang mampu memenuhi peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan kesempatan yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>11</sup>

Dengan demikian, keterkaitan teori dengan penelitian ini sejalan dengan tujuan umum peneliti, dimana peneliti melihat sejauh mana peran PKK dalam pemberdayaan perempuan, dan pelaksanaa program-program yang dilaksanakan PKK untuk masyarakat terkhususnya perempuan.

---

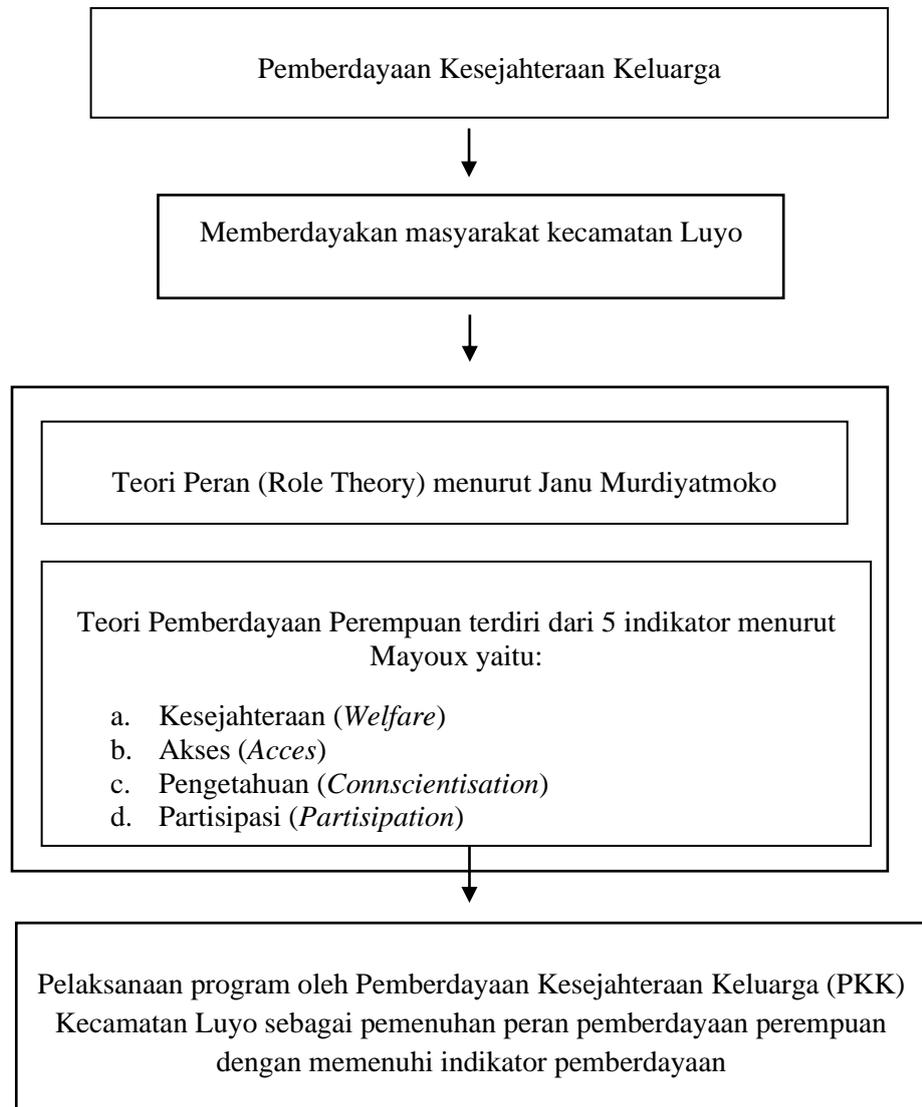
<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto. Op.Cit., hal.253

### 2.3 Kerangka Pikir

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi masyarakat yang menjadi wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat.

Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dicapai jika peran dari PKK dan Juga program kerja yang di sepakati berjalan dengan baik. Keterlibatan dari perempuan untuk melaksanakannya akan meningkatkan kualitas dan kapasitas dari perempuan di keluarga dan lebih luas lagi dapat berkontribusi di masyarakat. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan belum maksimal. Indikator pemberdayaan perempuan yakni: a) Kesejahteraan (*Welfare*), perempuan kecamatan Luyo belum tercapai dengan baik karena kesinambungan dari program yang bernilai finansial tidak berjalan konsisten; b) Akses (*Acces*), dari perempuan kecamatan Luyo belum bisa mengakomodasi seluruh perempuan kecamatan Luyo; c) Pengetahuan (*Connscientisation*), perempuan kecamatan Luyo belum dapat berkembang karena program kerja yang dilaksanakan berulang dan belum ada program baru; d) Partisipasi (*Partisipation*), dari perempuan belum melibatkan perempuan yang belum menikah dalam beberapa program karena program yang dilaksanakan terbatas pada kebutuhan ibu rumah tangga; dan e) kontrol dari perempuan terhadap kebijakan dan program kerja dalam PKK Kecamatan Luyo tidak sepenuhnya terkendali karena ada beberapa aturan yang belum berhasil di laksanakan terutama berkaitan dengan pergantian anggota yang tidak aktif.

Sedangkan peran dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah tercapainya tujuan untuk pemberdayaan perempuan, maka berdasarkan indikator pemberdayaan perempuan melalui Program

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum berjalan dengan maksimal karena ada beberapa kekurangan terutamanya dalam keterlibatan perempuan yang belum berumah tangga serta program kerja yang dirumuskan tidak inovatif dan tidak konsisten terutama yang berkaitan dengan finansial.

Kendala Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Luyo saat ini masihlah banyak. Terutamanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran pelaksanaan program, yang berdampak pada sumber daya manusia. Program-program yang dilaksanakan tidak menysasar seluruh golongan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat berkurang. Program-program yang berorientasi keluarga menjadi prioritas dari Tim Penggerak PKK kecamatan Luyo sehingga perempuan yang belum berumah tangga merasa tidak menjadi sasaran tersebut tidak menerima dampak dari pelaksanaan program.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, yakni:

1. Sosialisasi program agar masyarakat mengetahui sasaran dari setiap program agar partisipasi dari perempuan yang belum menikah dapat meningkat.
2. Peningkatan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan dan

pelaksanaan program atau kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan lain terutama akomodasi dan transportasi, sehingga peran Tim Penggerak PKK Kecamatan Luyo dapat meningkat.

3. Perlu membuka rekrutmen anggota secara rutin untuk menggantikan anggota-anggota yang tidak berkontribusi secara aktif.
4. Melakukan evaluasi ke desa dengan waktu yang lebih rutin agar kegiatan yang telah dilakukan dapat berkelanjutan.
5. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana terutama yang memberikan nilai ekonomis agar dapat terus dilaksanakan.
6. Kegiatan atau program yang dilakukan masih butuh banyak inovasi agar menarik dan memberikan kontribusi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aida Vitalaya S. Hubies, 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa (Bogor: IPB Press)
- Bagong, Suyanto & Sutinah. (2006). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group
- BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kompendium Tentang Hak-hak perempuan.
- Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, & TP PKK Pusat. (2021). *Strategi Gerakan PKK*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- Kasiram, Moh., (2008)., Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.
- Mardikanto, Totok., Soebianto, Poerwoko. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nyoman, Suartha, 2015. Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Penggerak PKK Pusat, 2015. Pemberdayaan dan kesejahteraan PKK, Jakarta: Tim Penggerak Pusat.
- Aslichati, Lilik. 2011. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan.

### Jurnal

- Aslichati, L. (2011). Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan. *Journal Organisasi dan Manajemen*, 1-14.
- Harahap, J. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simantahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Pemberdayaan Masyarakat*, 198-114.
- Roni, M., & Ganjar, G. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Daya Saing Produk Berbahan Ramah Lingkungan dan UKM. *Politica*, 23-31.

Wati, L., Suntoro, & Yanzi, H. (2015). Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung. *Kultur Demokrasi*, 33-45.

**Dokumen/ undang-undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga